

PERANG KECIL: Problem yang Terus Berlangsung

Faturochman

Universitas Gadjah Mada

Bila mendengar kata "perang", asosiasi yang muncul pada sebagian orang biasanya dua hal, pertama perang antar negara dan kedua perang saudara atau perang dalam satu negara. Bisa juga muncul asosiasi yang ketiga, yaitu perang dunia yang sejauh ini baru terjadi dua kali. Menyadari adanya kecenderungan seperti ini maka pada awal tulisan ini penulis menekankan bahwa penggunaan kata perang tidak terbatas pada tiga pengertian itu, tetapi justru menggunakannya untuk menganalisis peristiwa yang skalanya lebih kecil. Perang kecil dalam tulisan ini bisa berarti perang yang terjadi antara satu kampung dengan kampung lainnya, bisa juga perang antar sekolah, permusuhan antar sekelompok oknum angkatan dalam tubuh ABRI, dan sejenisnya. Kata-kata lain yang sering digunakan untuk pengganti kata perang di antaranya adalah kerusuhan, tawuran, dan konflik terbuka.

Salah satu faktor yang mendorong penulis untuk menganalisis permusuhan atau konflik sosial semacam itu adalah prevalensi peristiwa itu yang dari waktu ke waktu muncul. Dilihat dari skalanya, peristiwa seperti itu memang tampak kecil. Karena itu tidak mengherankan bila peristiwa seperti itu sering luput dari pengamatan para ahli untuk dibahas. Di samping itu, secara politis peristiwa-peristiwa seperti itu merupakan salah satu dari sekian topik *sensitif* karena sering mengandung unsur SARA. Se jauh ini bahasan tentang SARA lebih sering dihindari. Penulis juga menyadari tentang hal ini dan kesadaran ini mendorong untuk menganalisisnya agar bisa ikut menyumbangkan pemikiran dalam mengatasi konflik sosial yang berlatar belakang SARA, bukan untuk membesar-besarkan dan memperumit masalah itu.

Kerangka Konseptual

Ada beberapa konsep dan teori psikologi yang bisa membantu menganalisis perang antar kampung (lihat Hogg dan Abrams, 1988; Faturochman, 1993). Secara singkat, perang kampung bisa dianalisis sebagai permusuhan antar individu dalam konteks komunitas maupun permusuhan antar kelompok. Pandangan yang menekankan bahwa terjadinya permusuhan seperti bisa dianalisis dalam konteks interaksi antar individu antara lain dikemukakan oleh Adorno, dkk. (1950), Allport (1954), dan Rokeach (1960). Pandangan ini menyebutkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada sekelompok individu yang memiliki karakteristik otoriter, dogmatis, atau pola berpikir yang sempit (*closed mind*). Mereka biasanya mudah berprasangka dan tidak toleran. Karena karakteristik yang demikian itulah yang menyulut rasa permusuhan.

Dalam konteks permusuhan antar kelompok pandangan di atas itu kurang jelas dalam menerangkan permasalahannya. Bagaimana karakteristik individu bisa mempengaruhi kelompok? Tidak perlukah *individual differences* dan *personal characteristics* dipertimbangkan? Untuk menjawab dua pertanyaan itu konsep yang berorientasi individual tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut.

Secara teoritis memang bisa terjadi dalam satu kelompok individu atau anggotanya memiliki kesamaan karakteristik yang potensial menimbulkan permusuhan. Permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Apakah orang-orang yang memiliki kesamaan tersebut membentuk kelompok ataukah kelompok tersebut yang menularkannya kepada anggota? Ada kemungkinan kedua proses tersebut terjadi secara sendiri-sendiri, simultan atau bersama-sama (lihat Fraser dan Gaskell, 1990).

Pandangan yang lain lebih menekankan bahwa proses interaksi antar kelompok lebih berpengaruh daripada interaksi antar individu. Proses tersebut secara singkat bisa disebut sebagai proses kategorisasi, pengidentitasan, dan perbandingan (Billig, 1985). Dua kelompok yang baru saling berinteraksi secara cepat keduanya akan mengategorisasikan diri dan merasakan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut akan makin jelas bila identitas keduanya muncul. Dengan adanya identitas yang berbeda itu maka perbandingan tidak bisa dihindarkan. Hasil dari proses ini biasanya adalah makin menonjolnya perbedaan sementara persamaan yang ada pada kedua kelompok tidak diperhatikan (Cook dan Curtin, 1987).

Kelemahan dari pandangan yang menekankan proses interaksi antar kelompok itu adalah kurang kuatnya pernyataan bahwa perbedaan yang menonjol berarti permusuhan. Tidak selamanya perbedaan akan menyebabkan permusuhan. Bila anggota kelompok tidak memiliki karakteristik yang potensial menimbulkan permusuhan, maka konflik terbuka akan sulit muncul. Kecuali itu konflik tersebut bisa juga muncul bila ada pencetusnya. Menurut Sairin dan Semedi (1992), ada beberapa sumber yang bisa menyulut pertentangan di samping latar belakang psikologis seperti yang telah dikemukakan di bagian terdahulu. Mereka menggolongkan tiga sumber pertentangan yang menonjol. Pertama adalah perebutan sumber daya, kesempatan ekonomis dan alat-alat produksi. Kedua, batas-batas kelompok sosial merupakan sumber permusuhan yang cukup menonjol. Pelanggaran batas sosial bisa berbentuk pelecchan identitas kelompok lain maupun penerapan norma lain oleh kelompok yang berbeda. Sumber pertentangan kedua ini berkaitan erat dengan sumber ketiga, yaitu gangguan akibat benturan struktur kebudayaan seperti nilai-nilai, ideologi dan agama.

Kasus: Tawuran

Dari beberapa kerangka konseptual yang telah dibebankan di atas, maka kasus-kasus yang terjadi bisa dijelaskan dengan lebih mudah. Beberapa kasus yang diangkat dalam tulisan ini merupakan kasus nyata yang dimuat dalam Majalah Berita Mingguan Tempo. Dalam analisis kasus kali ini, tawuran antar sekolah yang sebenarnya banyak terjadi akhir-akhir ini tidak dibahas. Alasannya adalah karakteristik peristiwa tersebut yang berbeda banyak dengan kasus tawuran lain yang akan dianalisis dalam tulisan ini.

Pada kasus yang akan diuraikan (dalam Tempo, 22 Mei 1993), identitas sosial masing-masing kelompok (desa) sangat menonjol. Kasusnya adalah sebagai berikut.

Permusuhan antara penduduk desa Nuweletetu dan Sepa di Maluku Tengah konon sudah berlangsung lama. Dikabarkan bahwa dua warga desa tersebut saling mendendam karena sering bertikai. Penyebab utamanya diperkirakan karena masalah batas dua desa tersebut. Secara administratif atau pemerintahan masalah itu barangkali dianggap selesai. Namun ikatan kekerabatan di masing-masing desa itu sangat kuat, sehingga masalah batas desa identik juga dengan masalah batas kekerabatan.

Kerusuhan bermula dari perusakan pagar kebun kopi seluas 20 hektare milik warga desa Sepa yang berbatasan langsung dengan desa Nuweletetu. Untuk menyelesaikan masalah perusakan pagar tersebut, pemiliknya dengan ditemani dua orang warga desa Nuweletetu mendatangi kepala desa Sepa. Ternyata kepala desa tidak ada di tempat dan warga Sepa itu diterima oleh seorang tokoh masyarakat desa Nuweletetu. Menurut pihak warga desa Sepa, tokoh masyarakat tersebut menolak musyawarah dan malah menantang. Tantangan itu tidak diladeni, namun di tengah perjalanan pulang ke Sepa ketiga orang itu dikeroyok 10 pemuda Nuweletetu. Salah satu warga Sepa terluka parah karena dikeroyok.

Mengetahui perlakuan warga desa Nuweletetu yang demikian, warga Sepa marah sekali. Mereka kemudian menyerang desa Nuweletetu. Dalam perkelahian massal yang menggunakan

senjata tajam itu warga desa Nuweletetu kalah dan mundur ke hutan. Para penyerbu dari desa Sepa masih penasaran. Mereka lalu membakar rumah-rumah yang ditinggal penghuninya. Di samping kerugian harta benda itu, korban juga berjatuhan, terutama penduduk Nuweletetu.

Untuk mengatasi kerusuhan itu satu regu dari Polsek yang dikerahkan ternyata mengalami kegagalan. Lalu pihak keamanan mendatangkan 100 tentara untuk memulihkan keamanan di dua desa itu. Agar keamanan benar-benar terjamin akhirnya sekitar 200 polisi dan tentara kemudian disiagakan dan berjaga-jaga selama beberapa hari.

Di samping perbedaan teritorial, permusuhan antara dua desa di atas juga diwarnai oleh perbedaan marga. Kedua identitas tersebut pada dasarnya sudah ada sebelum terjadi kasus yang menyebabkan terbunuhnya beberapa warga desa dalam suatu kerusuhan. Pertentangan kedua kelompok menjadi berkobar setelah ada konflik batas wilayah atau teritori. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa identitas sosial antara dua kelompok di atas sangat kentara dan identitas itu berbeda tidak hanya karena secara psikologis memiliki batas, yaitu marga, tetapi juga memiliki batas fisik. Dengan demikian teori identitas sosial (Tajfel, 1982) bisa diterapkan untuk memahami konflik sosial. Sementara itu pecahnya konflik itu sendiri ditandai oleh pelanggaran terhadap batas wilayah yang sekaligus merupakan batas sosial (lihat Sairin dan Semedi, 1992).

Permusuhan antara dua desa juga pernah terjadi di Sumatera Selatan, yaitu antara warga Desa Rantaukadam dengan Desa Karangkapo (Tempo, 17 April 1993). Korbannya antara lain seorang anggota DPRD yang kebetulan lewat di salah satu desa tersebut.

Penyebab pokok dari peristiwa itu kurang jelas. Sejauh ini baru terungkap bahwa penyebabnya adalah permusuhan antar individu dari dua warga desa yang berbeda tersebut. Masing-masing warga desa kemudian membela kawannya. Kasus ini tampaknya satu bukti nyata dari *minimal group phenomenon* dan masih sulit dianalisis dengan menggunakan teori identitas sosial.

Minimal group phenomenon dalam batas tertentu ada persamaannya dengan kesetia kawan. Kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam arti keduanya memiliki ciri-ciri adanya usaha menguntungkan atau membela kawan dari kelompoknya. Kesetia kawan yang mengarah pada permusuhan dengan kelompok lain juga terjadi di Sumatera Selatan ketika seorang tentara anggota Batalyon Infanteri Tanjungenim dikeroyok polisi dari Markas Polisi Sektor Tebingtinggi. Kesetia kawan tersebut kemudian diwujudkan dengan melakukan balas dendam dengan menyerang Mapolsek Tebingtinggi oleh sekelompok tentara dari Yonif Tanjungenim. Hampir mirip dengan peristiwa itu, di Bandung sekelompok polisi dan tentara juga pernah *bertempur* (Tempo, 5 September 1992). Menurut berita yang disebar luaskan, peristiwa tersebut berawal dari pertikaian antara dua orang yang masing-masing berasal dari kesatuan yang berbeda, yaitu Angkatan Darat dan Kepolisian.

Kasus lain yang dimuat Tempo, 17 Juli 1993, memberikan gambaran peristiwa secara cukup detail. Kasusnya dipaparkan ulang seperti uraian di bawah ini.

Pada sekitar minggu kedua bulan Juli 1993 di Batam diberlakukan jam malam. Polisi dan tentara melakukan patroli secara intensif. Penjagaan keamanan yang ketat ini dilakukan karena ada perkelahian antara dua kelompok pemuda. Kelompok pertama adalah pemuda kampung Batu Aji sedangkan kelompok kedua para sopir taksi.

Kerusuhan berawal dari pemotongan gaji seorang satpam di lapangan golf Marina City bernama John yang berasal dari Flores. Alasan pemotongan gaji adalah karena John tidak masuk kerja dan mencuri 10 buah lampu. John tidak bisa menerima perlakuan itu dan mencurigai orang kepercayaan pemilik lapangan golf itu, bernama Mon yang berasal dari Bukit Tinggi, sebagai pemitnah. John kemudian memukul Mon sebagai pelampiasan kemarahannya.

Pekerjaan pokok Mon adalah sopir taksi. Pemukulan terhadap Mon oleh John dinilai oleh

sopir-sopir taksi kawan Mon sebagai perilaku tidak benar. Mereka kemudian mendatangi rumah John dan mengancamnya. Mendengar ancaman tersebut kawan-kawan John menjadi marah juga. Mereka melempari taksi yang lewat di kampung Batu Aji. Para sopir taksi pun tidak tinggal diam. Mereka balik menyerang kampung Batu Aji. Rupanya rencana serangan itu sudah terdengar oleh pemuda Batu Aji. Mereka lalu bersiap-siap untuk menyambut kedatangan para sopir taksi dengan membawa senjata tajam dan terjadilah perkelahian massal. Ada beberapa orang yang menjadi korban, tetapi tidak ada keterangan berapa jumlahnya.

Meskipun aparat keamanan kemudian mengambil tindakan, suasana tegang tetap terasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecurigaan pemuda Batu Aji terhadap orang yang lewat. Mereka siap untuk berperang dan menyanjai orang-orang yang lewat yang dinilai mencurigakan. Ada isu juga bahwa pemuda dari daerah Bukit Tinggi dan Flores di sekitar Batam berdatangan untuk membantu pihak masing-masing yang terlibat dalam permusuhan itu.

Bila dikaji, maka permusuhan antara sopir taksi dengan sekelompok warga desa pada akhirnya merupakan permusuhan antara dua kelompok. Hal yang menarik dari dua kelompok tersebut adalah identitasnya. Masing-masing kelompok memiliki dua identitas yang menonjol sekaligus. Kelompok pertama adalah kelompok sopir taksi sekaligus beridentitas daerah asal Bukit Tinggi. Kelompok kedua beridentitas warga Batu Aji dan asal daerah Flores.

Dilihat dari identitasnya maka ada perbedaan yang jelas antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Perbedaan ini membawa ke klasifikasi *ingroup-outgroup*. Terbentuknya klasifikasi ini bisa karena sejak awal atau sebelum terjadinya pemukulan terhadap salah satu anggota kelompok memang sudah ada perbedaan identitas, bisa juga tumbuh semenjak ada kasus pemukulan. Tampaknya perbedaan *ingroup* dan *outgroup* pada dasarnya sudah ada dan makin menonjol setelah terjadi permusuhan itu. Hal ini dibuktikan dengan cepatnya reaksi sopir taksi dengan jalan membalas pemukulan tersebut secara beramai-ramai.

Perihal identitas sosial kiranya sangat menonjol dalam kasus di atas. Sementara itu, sekedar kesetia kawanannya ataupun *minimal group phenomenon* tidak selalu dinilai cukup untuk menyulut permusuhan. Karakteristik otoriter pada sekelompok orang yang terlibat dapat mempertajam rasa permusuhan atau usaha untuk melakukan kekerasan. Hal inilah yang terjadi di Maospati, Magetan, Jawa Timur pada sekitar bulan Agustus 1993 (Tempo, 4 September 1993). Beberapa orang anggota TNI Angkatan Udara memukuli sopir bis yang lewat di sekitar pangkalan tempat mereka tinggal gara-gara salah satu bis menabrak dua orang wanita istri perwira TNI AU di tempat itu. Kematian itu menyulut kemarahan yang ditumpahkan dengan melakukan pemukulan terhadap para sopir.

Pada kasus ini ada dua kelompok, yaitu para sopir dan anggota TNI AU, dengan perbedaan otoritas dan kekuatan yang menyolok. Pemukulan yang dilakukan tersebut mengandung unsur unjuk kekuasaan pada pihak TNI AU kepada para sopir. Tidak adanya perlawanan dari para sopir kiranya disebabkan oleh karena mereka sadar bahwa kekuatan yang dimiliki tidak seimbang bila dibanding dengan kekuatan pihak yang memusuhi. Di sisi lain pihak yang memukul berani melakukan itu karena mereka yakin bahwa kekuatan yang dimiliki cukup besar. Sesuai dengan pendapat Adorno dkk. (1950), tindakan yang berkarakteristik otoriter pada umumnya ditunjukkan kepada pihak yang kekuatannya lemah. Itulah sebabnya anggota TNI AU berani melakukan pemukulan terhadap para sopir bis yang lewat di sekitar tempat tinggal mereka.

Kasus: Menghindari Konflik Terbuka

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di bagian terdahulu tidak hanya bisa menerangkan *tawuran* antar kampung atau antar kelompok. Konsep-konsep tersebut bisa juga

menjadi landasan untuk memelihara keharmonisan hubungan sosial. Untuk jelasnya, kasus di bawah ini (Tempo, 27 Maret 1993) bisa menjadi contoh untuk penerapan beberapa konsep itu.

Tanggal 24 Maret 1993 jatuh bertepatan dengan tahun baru Saka 1915. Pada hari itu umat Hindu menyambutnya sebagai hari raya nyepi. Beberapa cara merayakan hari itu antara lain tidak menyalakan api dan lampu, tidak membuat bunyi-bunyian, dan tidak melakukan bepergian selain berdoa. Pada hari itu di hampir seluruh wilayah Bali menjadi sangat sepi. Ada yang mengatakan hari itu Bali menjadi *kota mati*.

Tanggal 24 Maret 1993 bagi umat Islam juga merupakan hari istimewa. Hari itu merupakan hari terakhir berpuasa Ramadhan. Bagi umat Islam hari terakhir puasa itu biasanya digunakan untuk bertakbir sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu, namun penduduk yang beragama Islam juga tidak sedikit, sekitar 140 ribu orang. Bila kegiatan dua agama tersebut dilaksanakan bersama-sama diduga akan timbul masalah sosial. Dugaan ini ternyata tidak menjadi kenyataan. Jauh-jauh hari sebelum kedua peristiwa itu terjadi para pemimpin kedua umat melakukan perundingan untuk menghadapinya. Keputusan dari musyawarah itu antara lain menyebutkan bahwa perayaan nyepi dan Idul Fitri berjalan seperti biasa. Artinya kedua perayaan itu bisa berjalan bersama-sama.

Prinsip kesepakatan tersebut diambil agar masing-masing pemeluk agama tidak terhalangi untuk melakukan ibadahnya. Meskipun demikian pelaksanaan kedua perayaan itu dibuat untuk meminimalisir gangguan bagi umat lain. Orang Islam diminta untuk bertakbir di masjid dan surau dengan menggunakan pengeras suara, tetapi volumenya dikurangi dan arah suara tidak keluar arena. Untuk mengurangi mobilitas umat Islam dalam rangka membayar zakat fitrah yang biasa dilakukan sehari sebelum perayaan Idul Fitri, diminta pembayaran zakat itu dilakukan lebih awal atau pada hari-hari sebelum 24 Maret.

Toleransi kehidupan beragama seperti di atas tampaknya belum banyak dialami oleh kedua kelompok, namun keduanya menyadari benar tentang kemungkinan terjadi efek negatif bila masing-masing pihak saling bersikeras dengan kemauanya. Kedua umat tampaknya sama-sama menyadari bahwa konflik yang mungkin terjadi antara keduanya bisa merugikan masing-masing pihak. Sebagai contohnya adalah konflik Hindu-Islam yang menonjol pada akhir-akhir ini yang terjadi di India. Kasus *Ayodhya* yang terjadi di India telah menewaskan tidak kurang dari 600 orang dan sekitar seribu lainnya luka parah. Kasus tersebut kemudian berbuntut dan kerusuhan serta pengeboman satu kelompok oleh kelompok lainnya terjadi silih berganti. Tidak kurang dari 500 korban lain menyusul di beberapa tempat akibat upaya saling balas tersebut.

Cara penyelesaian masalah yang berpotensi menyulut konflik di atas ternyata mendekati konsep seperti yang dikembangkan pada masyarakat Jawa. Bahwa konsep tersebut tidak hanya ada pada masyarakat Jawa memang penekanan uraian pada bagian terdahulu itu tidak dimaksudkan untuk menonjolkan etnis tertentu, tetapi justru generalisasinya yang ditekankan, dalam hal ini eksistensi musyawarah dengan berbagai aspeknya.

Ada hal yang menarik dari kasus kerukunan yang terjadi di Bali itu. Ditinjau dari pandangan teori identitas sosial ternyata peristiwa itu berlangsung dalam suasana masing-masing kelompok memiliki identitas sosial yang menonjol. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan masing-masing kelompok berusaha untuk menurunkan kemenonjolan identitasnya. Padahal dalam wilayah itu juga ada kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan kata lain, teori identitas sosial seperti tidak bisa menerangkan fenomena itu secara jelas. Namun satu pemikiran dari para ahli dalam teori identitas sosial yang menyebutkan bahwa penyelesaian masalah seperti itu bisa dilakukan secara politis tampaknya berjalan baik dalam menangani kasus seperti di atas.

Pemahaman penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan teori identitas sosial

pada kasus di atas adalah dalam hal karakteristik peristiwa itu sendiri. Meskipun kedua perayaan kedua kelompok yang berbeda terjadi bersama-sama potensi konflik tidak muncul karena peristiwa itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu satu hari. Peristiwa itu tidak menonjolkan perbedaan karena pada waktu-waktu sebelumnya kedua kelompok sudah berinteraksi dengan baik. Dalam keadaan demikian tidak terjadi polarisasi yang menonjol. Oleh karena itu perbedaan perayaan yang hanya berlangsung sehari juga tidak perlu menjadi sumber masalah yang menonjol.

Kesimpulan dan Implikasi

Secara teoritis permusuhan bisa dipahami sebagai fenomena yang melekat pada individu maupun gejala yang umum terjadi dalam kelompok. Teori-teori yang dikemukakan oleh Adorno dkk. (1950), Allport (1954), dan Rokeach (1960) lebih menekankan faktor individu dalam membahas prasangka. Sementara itu, Billig (1985), Tajfel (1982), dan Turner (1982) lebih banyak menganalisis permusuhan dalam konteks hubungan antar kelompok.

Ada beberapa pandangan yang berbeda antara dua kelompok teori di atas, namun pada prinsipnya teori-teori tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya (lihat Billig, 1985; Faturochman, 1993). Hal ini makin jelas ketika teori-teori tersebut diterapkan untuk memahami realitas sehari-hari. Pada bagian terdahulu diperlihatkan bahwa ada kasus yang hanya bisa dipahami dengan menggunakan teori permusuhan yang individualistis, sedangkan kasus lain lebih mudah dipahami dengan menggunakan kerangka berpikir yang berorientasi pada hubungan antar kelompok. Ada juga kasus yang bisa dipahami dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut.

Hubungan antara rasa permusuhan dengan perang kampung yang diwujudkan dalam tindak kekerasan telah ditunjukkan pada tulisan ini. Kedua konsep ini sesungguhnya tidak selalu berhubungan dalam bentuk sebab-akibat. Untuk menjadi bentuk tawuran rasa permusuhan yang sudah ada perlu diperkuat dengan faktor-faktor lain. Beberapa faktor yang potensial menimbulkan permusuhan adalah perebutan sumber daya, konflik batas sosial, dan benturan struktur kebudayaan (Sairin dan Semedi, 1992).

Kasus-kasus yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan permusuhan tidak hanya berbahaya tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara-cara penanggulangannya. Untuk menanggulangi hal itu, beberapa perspektif tentang permusuhan bisa dimanfaatkan. Bila menggunakan pandangan bahwa permusuhan berkaitan dengan tipe kepribadian (Adorno dkk., 1950; Rokeach, 1960), maka usaha untuk menanggulangi hal itu akan melalui proses yang kompleks. Salah satu caranya ditunjukkan oleh Magnis-Suseno (1985), yaitu dengan melalui kondisionasi mulai dari masa anak-anak. Hal ini berbeda dengan masalah yang terjadi dalam konteks hubungan antar kelompok.

Kasus-kasus permusuhan yang berorientasi pada hubungan antar kelompok memang tidak kalah bahayanya dibanding kasus antar individu, tetapi alternatif penyelesaiannya bisa sekaligus tanpa melalui perlakuan individu per individu. Prinsip musyawarah tampaknya bisa menjadi alternatif yang dipercaya banyak pihak sebagai cara yang cukup efektif. Dari kasus yang dipaparkan menunjukkan bahwa cara tersebut akan lebih efektif bila ada antisipasi terhadap munculnya masalah secara lebih awal. Artinya, musyawarah dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi permusuhan bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Di samping musyawarah, penanggulangan permusuhan dapat dilakukan dengan membentuk identitas sosial yang menyatukan berbagai kelompok. Bila hal ini bisa terlaksana, maka langkah selanjutnya adalah menjaga agar tidak terjadi polarisasi yang mengakibatkan identitas kelompok-kelompok kecil tersebut lebih menonjol dibanding identitas kelompok

besarnya.

Tulisan ini telah membahas beberapa kemungkinan cara untuk mengatasi permusuhan. Beberapa cara tersebut sudah ada yang diterapkan dan bisa terus diterapkan di masa yang akan datang. Berbagai bentuk usaha yang dilakukan oleh para pengambil kebijaksanaan juga telah terbukti memiliki efektivitas yang memadai. Di sisi lain fakta-fakta menunjukkan bahwa peristiwa yang menunjukkan permusuhan dan kekerasan terus terjadi. Hal ini tampaknya lebih banyak disebabkan oleh kurang intensifnya usaha-usaha tersebut, bukan karena tidak adanya usaha. Oleh karena itu saran yang bisa dikemukakan untuk pengambil kebijaksanaan adalah meningkatkan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah tersebut tetapi tidak dengan cara menutup-nutupinya seperti yang selama ini dilakukan.

Referensi

- Adorno, T.W., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D.J. and Sanford, R.N. (1950). *The Authoritarian Personality*. New York: Harper and Row.
- Allport, G.W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Billig, M. (1985). Prejudice, Categorization and Particularization: From a Perceptual to a Rethorical Approach. *European Journal of Social Psychology*, 15, 79-103.
- Cook, T.D. dan Curtin, T.R. (1987). The Mainstream and the Underclass: Why Are The Differences so Salient and The Similarities so Unobtrusive. Dalam Master J.C. dan Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Faturochman (1993). Prejudice and Hostility: Some Perspectives. *Buletin Psikologi*, 1, 17-23.
- Fraser, C. dan Gaskel, G. (1990). *The Social Psychological Study of Widespread Beliefs*. Oxford: Clarendon Press.
- Hogg, M.A. and Abrams, D. (1988). *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. New York: Routledge.
- Magnis-Suseno (1985). Konflik dan Harmoni: Pengelolaannya dalam Wawasan Indonesia. *Prisma*, 2, 89-102.
- Rokeach, M. (ed.) (1960). *Open and Closed Mind*. New York: Basic Books.
- Sairin, S. dan Semedi P. (1992). *Telaah Pengelolaan Kerasian Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil-Hasil Penelitian Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara KLH dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Behaviour. *Annual Review of Psychology*, 33, 1-39.
- Tempo (22 Agustus 1992). Eksekusi Santet di Sukabumi. No. 25, h. 90.
- Tempo (5 September 1992). Mahkamah Militer, Pertempuran Ujung Berung. No. 27, h. 74.
- Tempo (27 Maret 1993). Takbir dalam Nyepi. No. 4, h. 85.
- Tempo (17 April 1993). Pembunuhan, Vonis Mati di Musirawas. No. 7, h. 88-89.
- Tempo (22 Mei 1993). Perkelahian, Perang Dua Desa. No. 12, h. 42-43.
- Tempo (3 Juli 1993). Pembunuhan, Matinya Seorang Pelacur. No. 18, h. 93.
- Tempo (17 Juli 1993). Perkelahian Pemuda, Jam Malam di Batam. No. 20, h. 41.
- Tempo (5 September 1993). Satu Sopir Sial, Semua Kena Getahnya. No. 27, h. 87.
- Turner, J.C. (1982). Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group. In H. Tajfel (ed.) *Social Identity and Intergroup Relations*. Melbourne: Cambridge University Press.